

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa terjadi perubahan pada belanja daerah di tahun sebelum, saat dan setelah Pilkada di daerah petahana. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa nilai realisasi belanja barang dan jasa pada satu tahun menjelang Pilkada lebih kecil dibandingkan tahun saat pelaksanaan Pilkada, kenaikan nilai realisasi tertinggi pada Kabupaten Cilacap, Pati dan Brebes masing-masing sebesar 260,7 M, 95 M dan 85,51 M. Nilai realisasi belanja bantuan sosial mengalami kenaikan signifikan pada satu tahun menjelang Pilkada, sedangkan Kabupaten lainnya cenderung fluktuatif.

Nilai realisasi belanja pegawai, modal, dan hibah di tahun menjelang lebih besar dibandingkan di tahun saat pelaksanaan Pilkada. Penurunan nilai realisasi pada belanja pegawai tertinggi pada Kabupaten Cilacap, Pati dan Brebes masing-masing sebesar 242,94 M, 91,33 M dan 44 M. Penurunan nilai realisasi pada belanja modal tertinggi pada Kabupaten Cilacap, Brebes masing-masing sebesar 193,01 M dan 191,14 M. Penurunan nilai realisasi pada belanja hibah tertinggi pada Kabupaten Brebes, Pati dan Cilacap masing-masing sebesar 83,67 M, 37,64 M dan 28,89 M.

## 5.2. Saran

Adapun saran dari penelitian yang telah dilakukan ialah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat menambahkan subjek penelitian pada daerah yang kepala daerahnya tidak mencalonkan diri kembali sebagai perbandingan antar subjek. Hal ini dapat memberikan gambaran luas terkait perbedaan perubahan belanja daerah dengan adanya Pilkada.
2. Peneliti berikutnya dapat menambahkan objek terkait pengaruh kekuatan politik Kepala Daerah untuk memberikan hasil penelitian yang lebih luas.
3. Bagi pemerintah daerah khususnya pada Kabupaten Brebes, Pati, Karanganyar, Magelang, Banyumas, Jepara dan Cilacap diharapkan dalam penyusunan anggaran dilakukan dengan kebijakan guna tercapainya keselarasan antara anggaran dan realisasipada pos belanja daerah.
4. Bagi pemerintah pusat sebaiknya lebih memperhatikan penggunaan anggaran terkait belanja daerah pada pemerintah daerah menjelang dilakukannya Pilkada. Hal ini dapat mempersempit kesempatan bagi kepala daerah petahana untuk bertindak demi kepentingan diri sendiri.